



**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**UNIT KERJA** : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **TRISMININGSIH**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **154092**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **1.360.000.000**

1. Tanah Seluas 83 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. Tanah Seluas 752 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 212 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 128 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **126.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA TEKNO 125 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000



6. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.  
30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 66.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 618.300.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.170.800.000

III. HUTANG Rp. 440.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.730.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.